

Eks Pasar Cepogo Dijadikan Ruang Terbuka

BOYOLALI (KR) - Setelah relokasi, eks Pasar Cepogo akan dijadikan ruang terbuka hijau berujud hamparan rumput yang dapat digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas. "Eks Pasar Cepogo ke depan akan dijadikan ruang terbuka hijau berwujud hamparan rumput yang dapat digunakan untuk berbagai aktifitas masyarakat dengan dilengkapi dengan ruang parkir, panggung, jogging track dan penanaman pohon-pohon peneduh," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Kabupaten Boyolali Arief Gunarto, Senin (7/3). Pada tahun 2021 dengan anggaran senilai Rp 1 miliar, pembangunan difokuskan pada perataan tanah agar menjadi datar atau rata, penanaman rumput dan pembangunan drainase.

Pada tahun 2022 ini, pembangunan di eks Pasar Cepogo ditargetkan selesai dengan total anggaran Rp 1,5 miliar untuk penyempurnaan area publik di kawasan Cepogo tersebut. Bupati Boyolali M Said Hidayat yang berkesempatan memonitoring eks Pasar Cepogo berharap bahwa area publik tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan yang positif. (R-3)

Pemkot Salatiga Optimalkan Program Puskesmas

SALATIGA (KR) - Pemkot Salatiga optimalkan program Pusat Kesehatan Sosial (Puskesmas) terkait penanganan kemiskinan. Program ini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan warga rentan miskin. Walikota Salatiga, Yuliyanto saat membuka Sosialisasi Puskesmas dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Tahun 2022, mengatakan, Puskesmas menjadi perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang perlu dikembangkan. Program ini penting dilakukan untuk memastikan masyarakat miskin atau rentan, mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial dengan cepat dan tepat.

"Saya minta kepada seluruh peserta sosialisasi dapat menjadikan kegiatan ini sebagai momentum mengoptimalkan fungsi Puskesmas di Kota Salatiga," kata Walikota, Senin (7/3). Puskesmas bisa dijadikan tempat pengaduan persoalan kemiskinan masyarakat sehingga akan mendapatkan penanganan yang tepat. Masyarakat bisa mendapatkan rujukan program, yang bisa mengentaskan dan membantu persoalan ekonomi. Program Puskesmas di dalamnya harus secara aktif menerima ragam keluhan dari berbagai bidang sosial masyarakat, mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan, pendudukan, sosial, ekonomi hingga usaha. (Sus)

Bupati Klaten Panen Cabai dan Kacang Panjang

KLATEN (KR) - Bupati Klaten Hj Sri Mulyani, Senin (7/3) panen cabai dan kacang panjang di lahan budidaya hortikultura Desa Jabung, Kecamatan Gantiwamo. Bupati Klaten juga menanam pohon jambu air di lahan pertanian Desa Jabung, serta menanam tanaman cabe di lahan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jabung Makmur tersebut. Didampingi jajaran pejabat Pemkab Klaten, Bupati Klaten Sri Mulyani melakukan panen cabai dan kacang panjang selama hampir 30 menit. Sri Mulyani mengapresiasi panen cabai di Desa Jabung dan menyarankan agar cabai yang dikelola BUMDes Jabung Makmur segera dipanen, karena saat ini harga cabai di pasar juga sedang bagus.

Lebih lanjut Bupati berpesan agar usaha budidaya pertanian di Desa Jabung tidak *obor blarak* satu atau dua tahun saja. Diharapkan usaha itu bisa dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kepala Desa Jabung Pramono Hadi, menjelaskan sekarang BUMDes Jabung Makmur mengelola lahan seluas 4 hektare antara lain untuk 1,5 hektare digunakan untuk menanam rumput Pakchong berkerja sama dengan Adin Putra Group, 1,2 hektare untuk budidaya hortikultura seperti cabai 12.000 batang, terong 1000 batang dan pepaya 800 batang. (Sit)



Bupati Klaten Sri Mulyani memanen cabai.

KR-Sri Warsiti

Driver Ojol Demo Soal Kesejahteraan

SEMARANG (KR) - Sekitar 700 driver ojol online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas Driver Online Bergerak Jateng, Senin (7/3) mendatangi kantor Gubernur Jateng. Aksi tersebut direspons Pemerintah, dengan mengajak beberapa perwakilan driver online untuk berdialog di dalam Kantor Gubernur.

Mereka menyampaikan aspirasi di hadapan Sekretaris Daerah Provinsi Ja-

teng Sumarno, Kepala Dinas Perhubungan Henggar Budi Anggoro, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sakinah, dan Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jateng-DIY Dhyah Swasti Kusumawardhani.

Kepala Dinas Perhubungan Henggar Budi Anggoro mengatakan, aspirasi yang disampaikan para driver ojol akan ditindak-



Ratusan driver Ojol saat demo di kantor Gubernur Jateng Semarang.

KR-Budiono

DPRD Kabupaten Magelang Sampaikan Pokok-Pokok Pikiran RKPD



MAGELANG (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang memberikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2023. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna, Jumat (4/3). Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang, Saryan Adiyanto menyebutkan berdasarkan hasil Reses Masa Sidang II dan III Tahun 2021 dan Rapat Dengar Pendapat dengan Perangkat Daerah, berhasil dirumuskan oleh Badan Anggaran daftar permasalahan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2023.

"Di Prioritas Beragama dan Berakhlak mulia, untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia, pendidikan pesantren sangat dibutuhkan,

kan, tetapi permasalahannya pemberian bantuan hibah dan bansos untuk pendidikan pondok pesantren. Ada ketimpangan hibah sehingga verifikasi oleh OPD harus diperbaiki," katanya, seperti dibacakan oleh Juru Bicara Badan Anggaran, Supardi.

Pada Prioritas Pendidikan, berkurangnya siswa / siswi di SD Negeri dan SMP Negeri di wilayah Kabupaten Magelang perlu dikaji dan dicarikan solusi baik dalam bentuk pemenuhan fasilitas penunjang pendidikan maupun regulasi aturan. Di bidang kesehatan, gedung laboratorium kesehatan telah selesai dibangun namun peralatan kesehatan dan ke dokteran masih jauh dari kebutuhan. Rumah Sakit Merah Putih yang belum dapat melayani pasien karena sarana pendukungnya belum disiapkan sehingga segera

diprogramkan di tahun 2023.

Di Prioritas Beragama dan Berakhlak mulia, untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia, pendidikan pesantren sangat dibutuhkan, tetapi permasalahannya pemberian bantuan hibah dan bansos untuk pendidikan pondok pesantren. Ada ketimpangan hibah sehingga verifikasi oleh OPD harus diperbaiki," katanya, seperti dibacakan oleh Juru Bicara Badan Anggaran, Supardi.

Pada Prioritas Pendidikan, berkurangnya siswa / siswi di SD Negeri dan SMP Negeri di wilayah Kabupaten Magelang perlu dikaji dan dicarikan solusi baik dalam bentuk pemenuhan fasilitas penunjang pendidikan maupun regulasi aturan. Di bidang kesehatan, gedung laboratorium kesehatan telah selesai dibangun namun peralatan kesehatan dan ke dokteran masih jauh dari kebutuhan. Rumah Sakit Merah Putih yang belum dapat melayani pasien karena sarana pendukungnya belum

disiapkan sehingga segera

diprogramkan di tahun 2023. "Kartu Tani yang sampai saat ini masih terkendala penerbitan dan pendistribusiannya menjadi salah satu penyebab pendistribusian pupuk bersubsidi di masyarakat dicarikan solusi agar para petani bisa segera mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai haknya," lanjut Supardi. Prioritas Lingkungan Hidup, TPA Desa Pasuruhan sudah over load,

Pemkab diminta segera menyediakan tempat alternatif lain untuk dijadikan tempat pembuangan akhir agar permasalahan sampah dapat teratasi.

DPRD menilai perlunya penataan kawasan lereng Merapi akibat kerusakan lingkungan hidup di eks penambangan mineral bukan logam / golongan C dan lebih meningkatkan pengawasan serta melakukan tindakan tegas untuk merusak lingkungan. (Adv)



KR-Istimewa

Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang menandatangani persetujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023.

KETUA LEMBAGA ADAT KASUNANAN SURAKARTA

Konsekuensi Duduk di Tahta Mataram Harus Muslim

SOLO (KR) - Penunjukan GPH Bhre Cakrahutomo sebagai Mangkunegara X yang merupakan penerus dinasti Mataram Islam sempat menimbulkan polemik. Pasalnya sang penerus pemimpin Pura Mangkunegaran itu menjadi muafak jelang penobatannya sebagai penguasa Pradja Mangkunegaran.

Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Koes Moertiyah Wandansari putri dari Pakubuwono (PB) XII Raja Kraton Kasunanan Surakarta juga sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Kraton Kasunan-an Surakarta yang termasuk dinasti Mataram Islam mengungkapkan bahwa sebagai pewaris Trah Mataram jangan sekali-kali membuat agama atau keyakinan dibuat mainan.

Menurutnya untuk keturunan Mataram Islam sendiri sudah dite-

kankan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo bahwa Mataram itu Kerajaan Islam. Manifestasi Kerajaan Mataram Islam di Jawa, catur sagotra (Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Pura Paku Alaman dan Pura Mangkunegaran).

"Ada beberapa contoh, lahir Islam. Karena pergaulan dan pengaruh lain akhirnya masuk agama lain. Namun, karena ada kepentingan lain atau kepentingan pribadi di kehidupannya terus akhirnya

kembali lagi ke agama Islam," kata Gusti Moeng kepada wartawan baru-baru ini.

"Saya banyak mendapat masukan juga didikan dari ayah saya yang bergelar Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Khalifatullah Sayidin Panata Gama Paku Buwono XII. Selain raja yang mengatur kerajaan juga diberi amanah mengelola atau mengatur agama. (Islam).

"Jangan sampai di Trah Mataram Islam menggunakan agama untuk kepentingan lain atau pribadinya. Karena konsekuensinya berat kena wewaler (kualat). Hingga dicabut haknya sebagai bangsawan Trah Mataram," ungkap Gusti Moeng. Gusti Moeng menyebut kalau sebagai anak keturunan Mata-

ram Islam harus paham betul apa yang menjadi paugeran secara adat.

"Jadi di zaman sekarang ini juga ada yang bisa memaksakan begitu. Kalau ngaku sebagai trah atau wangsa Mataram berarti ini merusak paugeran. Yang mana mereka harusnya menjalankan paugeran namun malah merusaknya," papar mantan anggota DPR RI tersebut. Gusti Moeng juga bercerita di kala mendiang PB XII saat memberikan petunjuk, barang siapa keturunan Trah Mataram yang berganti agama akan dihilangkan haknya sebagai trah. Bukan hanya itu, dirinya juga menjelaskan bahkan termasuk hak dimakamkan di pemakaman keluarga juga hilang. (Hwa)

PANGDAM IV/DIPONEGORO MAYJEN TNI RUDIANTO ULTAH

Kapolda Jateng Beserta Rombongan 'Geruduk' Puri Wedari

SEMARANG (KR) - Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi beserta rombongan, Senin (7/3) pagi secara nendak berdatang ke Puri Wedari Jalan Taman Diponegoro Semarang. Kehadiran Kapolda Jateng tentu saja mengejutkan petugas jaga maupun tuan rumah Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto.

"Ada apa ini, ada apa ini. Silakan semuanya masuk," ungkap Pangdam Rudianto kepada rombongan Kapolda Jateng.

Kapolda juga tidak lepas dengan senyum langsung mengulurkan tangan me-

ngajak bersalaman. "Selamat ulang tahun. Tambah semangat, tambah kelihatan muda, tambah bijaksana," kata Kapolda Jateng. Ucapan selamat juga disampaikan anggota rombongan diantaranya Dansat Brimob, Kombes Pol Yopie Indra Prasetya, Kabid Humas Kombes Pol M Iqbal Alqudusy serta Kabid TIK Kombes Pol Alfian Nurzilah.

Rudianto didampingi istri mengajak Kapolda bersama rombongan yang telah mempersiapkan diri membawakan kue ulang tahun dan tumpeng mengajak masuk. Bertepatan

7 Maret 2022, Panglima Kodam IV yang lama bertugas di Kopassus itu merayakan ulang tahun ke-55. Alumni Akmil 1989 ini dilahirkan di Kudus, 7 Maret 1967.

Pangdam setelah bersalaman menerima ucapan selamat ulang tahun tamunya, lalu mengambil nasi tumpeng dan menyuapkannya kepada Kapolda.

Usai berpelukan, keduanya lantas bercengkrama didampingi pejabat utama Polda yang turut mendampingi Irjen Ahmad Luthfi dalam kegiatan tersebut. Di tengah ke-

asyikan mengobrol, Kapolda Jateng mengungkapkan dirinya cukup gembira dengan kebersa-

maan yang selama ini dibangun bersama Pangdam dan jajaran Kodam IV/Diponegoro. (Cry)



KR-Istimewa

Pangdam IV Mayjen TNI Rudianto menyuapi Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Mimbar Legislatif

Dewan Sosialisasikan Perda Pemberantasan Narkoba

WAKIL Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri berharap adanya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dengan masuknya unsur masyarakat diyakini akan memperoleh ruang gerak peredaran narkoba. Quatly Abdulkadir Alkatiri mengatakan hal ini dalam Dialog Sosialisasi Perda (Sosper) dengan tema 'Sosialisasi Perda No 1/2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika' di Sukoharjo, Minggu (6/3).

Diakui, Jateng menjadi daerah strategis dalam penyebaran narkoba. Provinsi ini merupakan daerah persimpangan antara Provinsi Jabar dan Jatim. Dengan demikian butuh sinergi dan kerja sama antarprovinsi untuk mencegah peredaran narkoba. Pemerintah dan aparat harus menjalin komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat setempat. Tindakan ini sebagai antisipasi dini untuk menangkis narkoba supaya tidak mengancam keberlangsungan generasi muda.

Tugas DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya penegakan Peraturan Daerah (Perda). Untuk itu, jika peme-



KR-Budiono

Quatly Abdulkadir Alkatiri

rintah tidak menjalankan perda yang sudah diundangkan, Dewan siap untuk menegur. Dewan berharap pemerintah perlu hidupkan upaya deteksi dini, antisipasi, pencegahan, pemberantasan, penanganan kelembagaan, dan upaya maksimal lainnya. Forum-forum di tingkat RT, RW bisa digalakkan untuk pencegahan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sukoharjo Moh Zambrodin mengatakan pintu masuk penggunaan narkoba berasal dari minuman keras. Ia sepakat Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika' di Sukoharjo, Minggu (6/3). Perda No 6/2017 milik Sukoharjo harus ditekankan. Baginya minuman keras harus diatur supaya tidak mudah beredar di masyarakat. Meskipun persentase alkohol di bawah 50%, pemerintah daerah harus mengatur. Jangan sampai minuman keras dijual bebas di masyarakat. Dalam pengaturan alkohol di Bekonang, Pemkab Sukoharjo sudah mengatur supaya alkohol tidak disalahgunakan untuk produksi minuman keras. (*)

(Disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)